Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed.

MANAJEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DAN OTONOMI DAERAH DALAM MENGHADAPI ARUS PERUBAHAN GLOBAL

DAFTAR ISI

Halaman

Pendahuluan 1

I. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN OTONOMI DAERAH 3

- Pendidikan Nasional dan Pendidikan Watak Indonesia 5
- Otonomi Daerah dan Tanggung Jawab Pendidikan: UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6
- Masalah Distribusi Tenaga Pendidikan 8

II. TANTANGAN DUNIA YANG MENGGLOBAL 9

Connect – Compete – Collaborate 12

Nasionalisme dan Identitas Internasional 13

III. MANAJEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, OTONOMI DAERAH DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN GLOBAL 15

- Local Wisdom Go Global 16
- Manajemen Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi 19
- Pendidikan Dasar 20
- Pendidikan Menengah 21
- Manajemen Pendidikan Tinggi 21

KESIMPULAN DAN SARAN 22

REFERENSI 25

MANAJEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DAN OTONOMI DAERAH DALAM MENGHADAPI ARUS PERUBAHAN GLOBAL

Oleh: H.A.R. Tilaar

PENDAHULUAN

Tema pokok tulisan ini berada di dalam ranah yang disebut politik pendidikan (politic of education) yang merupakan suatu wacana baru di dalam disiplin ilmu pendidikan. Politik pendidikan menganalisa hubungan yang erat antara politik dalam arti yang luas dengan pendidikan.[1] Antara politik dan pendidikan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi atau hubungan timbal-balik. Politik dalam arti yang luas berkenaan dengan masalah kekuasaan. Dalam sejarah pendidikan diketahui betapa eratnya politik dan pendidikan di mana banyak kali pendidikan dijadikan sebagai alat politik praktis dalam menjalankan kekuasaan. Kita ingat misalnya bagaimana Hitler dengan Hitler Jugend-nya berupaya untuk melestarikan rasisme di Jerman dalam Perang Dunia II. Negara-negara fasis telah menggunakan sistem pendidikan nasionalnya sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada zaman pendudukan tentara Jepang kita mengalami bagaimana pendidikan di Indonesia di-Nippon-kan dengan upacara setiap pagi menghadap Tokyo dan memberikan hormat kepada Tenno Heika. Dalam era Orde Lama dan Orde Baru kita mengenal bagaimana ideologi negara diturunkan kepada generasi muda melalui metode indoktrinasi. Dalam Era Reformasi sebagai suatu era peralihan

---

[1] Michael W. Apple cs. (ed.), **Globalizing Education: Policies, Pedagogies & Politics.**

kepada kehidupan yang demokratis tampak gejala ekses-ekses kebebasan tanpa batas yang merupakan eksperimentasi di dalam kehidupan berdemokrasi yang semakin diakselerasi oleh tiupan tsunasi globalisasi yang dilandasi oleh paham liberal.

Pendidikan nasional yang merupakan milik suatu bangsa seharusnya dikelola (manage) untuk mencapai tujuan kehidupan bersama dalam suatu masyarakat dan negara. Pada dasarnya pendidikan nasional merupakan sarana di dalam pewujudan, pelestarian, dan pengembangan kehidupan nasional. Dengan kata lain pendidikan nasional berfungsi untuk melestarikan kekuasaan atau legitimasi kehidupan nasional.

Pelestarian kekuasaan nasional untuk mencapai tujuan nasional yang disepakati bersama di dalam dunia yang terbuka dewasa ini mengalami berbagai goncangan. Masyarakat dan bangsa Indonesia tidak dapat menutup diri dari perubahan global. Dia dapat hanyut di dalam perubahan global tersebut tetapi dia juga dapat menentukan posisi menghadapi perubahan itu.

Masyarakat dan bangsa berada di dalam posisi untuk mempertahankan kekuasaan nasional yang disepakati bersama sekaligus membuka pintu bagi masuknya perubahan-perubahan global di mana masyarakat dan bangsa Indonesia perlu menentukan posisinya. Salah satu problem besar di dalam masyarakat Indonesia dewasa ini ialah menentukan posisi di dalam transformasi masyarakat demokrasi antara lain pelaksanaan otonomi daerah dan sekaligus menempatkan proses demokratisasi masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam perubahan global. Disinilah letak peranan pendidikan nasional yang berupaya menyiapkan generasi muda untuk suatu masyarakat demokrasi yang kuat dalam perubahan global yang cepat serta menyadarkan masyarakat dalam proses peralihan secara bertahap, mantap dan aman. Inilah fungsi pendi-

dikan nasional Indonesia baik dalam sektor pendidikan formal, informal dan non-formal. Dalam kaitan ini perlu dicatat pemikiran Antonio Gramsci[2] mengenai peranan pendidikan dalam terbentuknya kelompok **intelektual organik** yaitu kaum intelektual yang dapat mengubah suatu masyarakat bukan secara revolusioner tetapi secara demokratis. Di dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia pendapat Gramsci tersebut bersamaan dengan pendapat Moh. Hatta ketika Hatta mempertahankan partai politik yaitu Partai Pendidikan Indonesia sebagai kelanjutan dari Partai Nasional Indonesia yang ditutup oleh pemerintah kolonial Belanda.[3]

I. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN OTONOMI DAERAH

Menyadari akan pentingnya peranan pendidikan dalam suatu negara Indonesia merdeka maka dalam UUD 1945 Bab 13 tentang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu unsur penting di dalam negara Republik Indonesia. Pasal 31 menekankan mengenai hak warganegara untuk mendapatkan pendidikan, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Selanjutnya pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional serta menekankan kepada salah satu komponen penting di dalam penyelenggaraan pendidikan ialah sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan nasional. Selanjutnya sistem pendidikan nasional memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya Pasal 32 menekankan kepada kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional.

---

[2] Antonio Gramsci, **Selecting from Cultural Writings,** hlm. 39-40. Lihat juga H.A.R. Tilaar, **Kekuasaan dan Pendidikan** (2009), hlm. 136-139.

[3] Mohammad Hatta, **Untuk Negeriku. Berjuang dan Dibuang** (2010), hlm 26-29.

Kedua pasal dalam satu bab UUD 1945 tersebut tentunya mempunyai makna yaitu adanya hubungan yang erat antara pendidikan nasional dan kebudayaan nasional. Hal ini perlu kita cermati bersama oleh karena di dalam Era Reformasi pendidikan nasional dan kebudayaan nasional telah dipisahkan. Pemisahan antara kedua unsur tersebut mempunyai implikasi yang jauh di dalam pembentukan warganegara Indonesia.

Dewasa ini karena pengaruh globalisasi sistem pendidikan nasional telah digerogoti dengan menggunakan berbagai sistem pendidikan lainnya seperti penggunaan kurikulum asing, sekolah-sekolah yang disebut bertaraf internasional; keseluruhannya jelas terlepas dari kebudayaan nasional. Penyimpangan tersebut nyata-nyata telah melanggar Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan: "Pendidikan nasioal adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman."

Apabila kita menempatkan peranan pendidikan nasional di dalam memelihara dan mengembangkan empat pilar negara Republik Indonesia yaitu: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, maka tidak dapat disangkal peranan pendidikan nasional didalamnya. Namun yang kita lihat sekarang ini di dalam sistem pendidikan nasional, Pancasila tidak lagi diajarkan di semua tingkat dan jenis pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan bukan lagi merupakan sebagai pusat-pusat kebudayaan bagi generasi penerus, pendidikan yang bermutu bukan lagi untuk semua tetapi telah merupakan *privilege* anak-anak yang beruang. Tidak mengherankan apabila dewasa ini kita sedang mengalami penggerusan rasa nasionalisme bagi gene-

rasi muda dan di dalam masyarakat. Pendidikan nasional tidak lagi mempunyai idealisme sebagaimana yang dicita-citakan oleh para founding fathers tetapi telah diubah menjadi lembaga-lembaga komersial yang hanya diperuntukkan bagi siapa yang beruang.

RSBI/SBI jelas-jelas bertentangan dengan jiwa UUD 1945 karena sistem sekolah yang demikian telah mengotak-ngotakkan masyarakat di dalam kelas-kelas. Pengotakan masyarakat di dalam kelas-kelas hanya dikenal di dalam sistem pendidikan kolonial yang menggunakan antara pendidikan bagi golongan elit (pemerintah kolonial dengan kaum feodal), kelompok Timur Asing, dan kelompok bumi putera. Selain daripada itu sekolah-sekolah Indonesia telah menutup pintu bagi anak-anak dari keluarga miskin. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD yang mengatakan bahwa setiap warganegara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pendidikan Nasional dan Pendidikan Watak Indonesia

Pendidikan nasional merupakan sarana dalam mempertahankan keempat pilar Negara Republik Indonesia. Hal ini berarti pendidikan nasional harus berdasarkan kepada Pancasila, UUD 1945, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengakui kenyataan sosial kebhinnekaan masyarakat Indonesia. Jika demikian halnya maka pendidikan nasional merupakan sarana pembentukan kelompok intelektual organis yang menjadi pendukung dan pelaksana dalam membangun Negara Republik Indonesia. Individu dan anggota kelompok tersebut haruslah memiliki apa yang disebut watak atau karakter bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia tidak dapat mengambil-alih karakter dari bangsa yang lain oleh sebab setiap bangsa mempunyai identitasnya sendiri.[4] Identitas

---

[4] Lihat pendapat Ralph Linton dalam H.A.R. Tilaar, **Agama, Budaya dan Pendidikan Watak Bangsa** (2010), hlm. 12-14.

suatu bangsa terletak di dalam kebudayannya. Jadi watak bangsa Indonesia berakar dari kebudayaan Indonesia. Jelaslah kiranya sistem pendidikan nasional yang terpisah dari kebudayaan nasional Indonesia akan menjadikan sistem pendidikan nasional yang rapuh.

Sistem pendidikan nasional yang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya ditujukan kepada pemberian pendidikan bermutu untuk semua warganegara Indonesia. Kenyataannya ialah terdapat diskrepansi antara satu daerah degan daerah yang lain apalagi negara Republik Indonesia terdiri dari 17 ribu pulau. Mutu pendidikan di kebanyakan pulau-pulau terpencil sangat rendah. Oleh sebab itu pemerataan pendidikan yang bermutu dengan memberikan kesempatan yang sama untuk semua peserta-didik di Nusantara merupakan prioritas yang tinggi.

Kebhinnekaan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, menuntut suatu sistem pendidikan nasional yang berdiferensiasi dalam arti perlakuan yang tak sama bagi setiap daerah. Di dalam kaitan ini pelaksanaan otonomi daerah di dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah haruslah dirumuskan dengan tepat. Ujian nasional yang menyamaratakan peserta-didik di seluruh Nusantara merupakan suatu hal yang bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Fasilitas, kesempatan, mutu pendidikan di berbagai daerah berjenis-jenis. Belum lagi memperhitungkan perbedaan budaya serta sosial ekonomi yang meminta perlakuan pendidikan yang sesuai. Hal ini akan kita lihat lebih lanjut di dalam desentralisasi pendidikan.

Otonomi Daerah dan Tanggung Jawab Pendidikan: UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Di dalam Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 ditentukan mengenai urusan Pemerintah Pusat meliputi a) politik luar negeri, b) per-

tahanan, c) keamann, d) Justisi, e) moneter dan fiscal nasional dan f) agama.

Di luar urusan pemerintah pusat tersebut di atas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal itu berarti pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah daerah. Dalam Bab 14 Pengelolaan Pendidikan Pasal 50 Ayat (4) dirumuskan demikian: Pemerintah daerah propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya Pasal 5 merumuskan: Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Marilah kita cermati lebih lanjut pelaksanaan dari desentralisasi pendidikan nasional dengan memberikan tanggung jawab kepada propinsi/kabupaten/kota dalam menajamen pendidikan nasional.

Pertama-tama mari kita lihat pembiayaan pendidikan dasar dan menengah sebagai salah satu komponen yang penting di dalam manajemen pendidikan. Meskipun UUD 1945 menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan namun demikian belum dapat menjamin ketentuan tersebut dapat dipenuhi. Meskipun kita mengenal adanya berbagai alokasi untuk pendidikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah namun demikian belum dapat kita jamin ketentuan tersebut dipenuhi oleh daerah. Prioritas daerah menunjukkan pentingnya sektor-sektor di luar pendidikan yang diperhatikan sedangkan untuk pendidikan masih dijadikan

sebagai prioritas yang rendah. Demikian pula masalah kepegawai-an seperti posisi Kepala Dinas Pendidikan, Pengawas, Kepala Sekolah di banyak daerah telah dijadikan sebagai pos politik sehingga tuntutan profesionalisme dikesam-pingkan.[5]

Masalah distribusi tenaga pendidikan

Lembaga pendidikan merupakan lembaga yang berada di hampir setiap desa dan pelosok di Nusantara. Dengan demikian betapa besarnya peranan guru di dalam pembentukan dan mempertahan-kan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembentukan karakter bangsa Indonesia, tentunya sangat strategis dan efektif. Tetapi di dalam kenyataannya UU No. 32 Tahun 2004 telah membatasi mobilitas pendidik di Nusantara. Tidak mungkin seorang guru di daerah Aceh dapat dikaryakan untuk sekolah-sekolah di Papua. Oleh sebab itu ada baiknya apabila tenaga pendidik menjadi urusan pemerintah pusat. Tidak semua desa mempunyai polisi atau tentara tetapi yang pasti ialah hampir seluruh desa di Nusantara mempunyai tokoh seorang guru. Oleh sebab itu peranan guru sebagai agen pemersatu bangsa Indonesia, sebagai agen pembentuk kelompok intelektual organik yang menjadi motor dari perubahan sosial masyarakat sangat menentukan. Demikian pula Dinas Pendidikan propinsi di dalam mengkoordinasikan pembinaan tenaga-tenaga guru di propinsinya dirasakan kurang efektif. Lebih bermanfaat apabila propinsi mengambil tanggung jawab terhadap penyusunan kurikulum di daerah yang sesuai dengan kebutuhan peserta-didik di daerahnya. Apa yang dikenal dewasa ini dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan suatu pepesan kosong karena ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Seharusnyalah

---

[5] Lihat **KOMPAS,** 22 Juni 2001, "Evaluasi Desentralisasi Pendidikan."

apabila KTSP disusun oleh setiap kabupaten/kota dengan koordinasi propinsi. Atau seperti yang telah dijelaskan akan lebih efektif apabila tugas nasional tersebut dipegang kembali oleh Pemerintah Pusat.

II. TANTANGAN DUNIA YANG MENGGLOBAL

Oleh karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi komunikasi, dunia seolah-olah telah menjadi satu kampung besar atau oleh Friedman dikatakan sebagai "flat, hot, crowded."[6] Apabila ranah Prof. Held mendefinisikan globalisasi sebagai "free movement of good people an money" tetapi lebih daripada itu dunia dewasa ini telah merobek-robek kehidupan sosial ekonomi dari bangsa-bangsa. Indonesia juga tidak terlepas dari apa yang disebutr arus/gelombang globalisasi.

Posisi Indonesia Menghadapi Arus Globalisasi

Prof. Held dan McGraw[7] mengemukakan tiga posisi di dalam meng-hadapi arus perubahan global. Posisi yang pertama ialah **Kelompok Globalis** yang beranggapan bahwa kekuatan global telah melanda dunia tanpa kecuali. Tidak ada satu masyarakat atau negara yang terlepas dari perubahan global di dalam kehidupannya. Dunia seakan-akan memang telah menjadi rata dengan adanya kemajuan teknologi informasi; kejadian di bagian dunia yang lain pada saat yang bersamaan dirasakan dan diketahui oleh manusia di seluruh dunia. Demikian pula arus barang, manusia, kebudayaan mengalir ke seluruh dunia dibawa serta oleh hubungan yang semakin cepat yang telah menyatukan seluruh umat manusia. Bahkan manusia dewasa ini telah disatukan

---

[6] Thomas L. Friedman, **Flat, Hot, Crowded** (2008).
[7] David Held & Anthony McGrew, **Globalization/Anti-globalization** (2002).

melalui dunia maya. Kelompok globalisasi ini didukung oleh IBRD/ IMF yang setiap tahun mengadakan pertemuan di Davos, Switzerland. Pertemuan Davos merumuskan strategi perkembangan ekonomi dunia dalam World Economic Forum.

Bertentangan dengan kelompok globalis adalah **Kelompok Skeptis** yang meragukan peranan kelompok globalis yang menurut mereka dikendalikan oleh modal besar. Dengan kata lain kelompok skeptis yang membela rakyat biasa yaitu negara-negara berkembang yang kebanyakan masih merupakan negara miskin berhadapan dengan negara-negara industri yang dikendalikan oleh modal besar. Dengan kata lain kelompok skeptis berperang melawan kelompok globalis yang menganut paham liberal. Mereka beranggapan kelompok globalis melahirkan Darwinisme sosial yaitu yang kuat, yang kaya akan menindas yang lemah. Kenyataannya menurut kelompok skeptis, kemiskinan di dunia bukan semakin berkurang tetapi semakin besar jurang antara negara kaya dan negara miskin. Darwinisme sosial tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak tetapi kepada kepentingan modal besar.

Pertentangan kedua kelompok ekstrim tersebut di atas bukanlah satu-satunya jalan di dalam menghadapi gelombang globalisasi. Menurut Held dan McGraw terdapat kelompok ketiga yang disebutnya **Kelompok Transformasionalis**. Kelompok ini mengakui adanya kekuatan global yang sedang mengubah dunia namun demikian kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan negara-negara berkembang mencapai taraf kehidupan yang semakin baik. Kelompok ini tidak menolak hal-hal yang modern yang dobawa oleh gelombang globalisasi tetapi dengan memilah-milah serta memilih mana yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakatnya.

Dimanakah posisi Indonesia di dalam menghadapi gelombang globalisasi tersebut di atas? Menjawab pertanyaan ini mudah-mudah sukar. Secara jelas dikatakan di dalam UUD 1945 bahwa ekonomi Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Tentunya asas ini bukanlah asas liberalisme juga bukan asas skeptis. Prinip kemanusiaan di dalam Pancasila menunjukkan tanggung jawab manusia Indonesia untuk kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia. Oleh sebab itu prinsip kehidupan sosial ekonomi Pancasila bukanlah menolak segala sesuatu yang dibawa oleh perubahan global namun memilih posisi yang mengambil unsur-unsur modern yang memperkaya kehidupan masyarakat Indonesia. Namun kenyataannya ialah terdapat gejala-gejala Indonesia mulai meng-*adopt* paham liberal. Ekonomi dirasakan masih menguntungkan modal besar dan belum sepenuhnya ditujukan untuk mengangkat ekonomi rakyat, petani dan nelayan yang masih hidup di dalam serba kekurangan. Penduduk Indonesia masih 40 juta yang hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun di dalam World Economic Forum East Asia yang baru-baru ini dilaksanakan di Jakarta menunjukkan akan optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia namun masih merupakan suatu pertanyaan yaitu sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat memecahkan masalah kemiskinan. Inilah yang merupakan salah satu topik pembahasan dalam sidang WEF East Asia.[8]

Di dalam bidang pendidikan kita lihat betapa nasib dari BHP dalam UU No. 20 Tahun 2003 dicabut oleh Mahkamah Konstitusi karena berbau paham neoliberal. Demikian pula gejala-gejala adanya RSBI/SBI serta masuknya standarisasi pendidikan nasional yang mengacu kepada negara-negara OECD (negara-negara

---

[8] Lihat **BISNIS INDONESIA,** Rabu, 15 Juni 2001, "Schwab lempar tantangan."

industriu maju) menunjukkan orientasi pendidikan nasional kita bukan kepada kepentingan rakyat tetapi kepada kepentingan modal-modal besar. Ujian Nasional dewasa ini yang bukan dilaksanakan untuk kepentingan peserta-didik tetapi lebih kepada citra pemerintah oleh karena Ujian Nasional tidak membantu di dalam mengembangkan watak bangsa Indonesia. Lihat saja kepada nasib seorang anak siswa SD di desa yang ingin mempertahankan kejujuran bahkan mendapatkan hukuman karena kejujurannya itu.

Dari data-data yang penulis kemukakan di atas menunjukkan manajemen pendidikan nasional perlu dikaji kembali agar supaya lebih jelas dan diarahkan berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum di dalam Pancasila dan UUD 1945.

Connect – Compete – Collaborate[9]

Telah dijelaskan masyarakat dan bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari arus perubahan global. Namun demikian kita perlu menentukan sikap agar tidak hanyut di dalam proses globalisasi tanpa jiwa (Ritzer). Telah pula disinggung sepintas mengenai adanya gejala Indonesia mulai terseret oleh paham neoliberal bukan hanya di dalam bidang ekonomi tetapi juga di dalam bidang pendidikan.

Dalam bidang sosial ekonomi agaknya visi Indonesia masa depan telah dikangkangi oleh paham neoliberal itu. Kita lihat dalam penjelasan atas UU RI No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dikemukakan tidak kurang dari 26 kali mengemukakan mengenai **"prinsip daya saing"** yang perlu dikenalkan dalam masyarakat Indonesia.

---

[9] Slogan **World Islamic Economic Forum.**

Prinsip daya saing seperti telah dijelaskan merupakan dasar dari paham neoliberal.

Menarik perhatian penulis mengenai motto dari World Islamic Economic Forum yang baru-baru ini diadakan di Astana Ibukota Kazakhstan. Motto dari WIEF pertama-tama menunjukkan pentingnya hubungan antarbangsa di dalam dunia yang mengglobal. Memang tanpa hubungan tidak mungkin terjalin kerjasama antarbangsa di dalam proses globalisasi dewasa ini. Dalam hubungan antarbangsa tentunya setiap bangsa (nation) akan berupaya menghasilkan karya-karyanya yang prima atau dengan kata lain mereka harus saling bersaing untuk menghasilkan produk-produk yang bermutu tinggi dan di dalam persaingan internasional akan menghasilkan karya yang semakin lama semakin baik. Persaingan internasional yang mempunyai nilai positif tersebut dapat juga berakhir dengan nilai-nilai yang negatif sebagaimana yang ditunjukkan di dalam prinsip Darwinisme sosial. Oleh sebab itu prinsip persaingan perlu dilengkapi dengan prinsip kolaborasi atau kerjasama. WIEF merupakan persatuan dari negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Namun demikian organisasi tersebut tidak menutup diri dengan negara-negara lain yang mempunyai latar belakang sosial, politik, kebudayaan yang berbeda. Pada akhirnya semua bangsa perlu berkolaborasi untuk meningkatkan taraf hidup umat manusia. Itulah cita-cita WIEF yang tidak berhenti kepada persaingan tetapi kepada kolaborasi antarbangsa.[10]

Nasionalisme dan Identitas Internasional

Sikap yang terlalu mengagung-agungkan globalisasi perlu mewaspadai melihat data-data yang dikemukakan oleh Prof. Pankaj

---

[10] Dalam sidang ke-7 WIEF yang diselenggarakan di Astana, ibukota Kazakhstan, 7 – 9 Juni 2011, perempuan Indonesia diwakili oleh Dr. Martha Tilaar dengan pidatonya mengenai **"Women Entrepreneurship and Leadership,"**

Ghemawat dari IESE Business School di Spanyol.[11] Inilah data-data yang dikemukakannya, sekitar 80% dari stock market global berada di tangan perusahaan-perusahaan yang mempunyai markas besarnya di tanah airnya. Besarnya eksport di dunia hanyalah merupakan ¼ dari ekonomi global. Hanya sekitar 2% dari mahasiswa mengikuti pendidikannya di luar negeri dan kurang dari 2% dari lalu lintas internet melampaui batas-batas negara. Diakui bahwa dunia memang mengarah kepada kesatuan tetapi juga menjadi lebih fragmentasi. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di Amerika Serikat sebenarnya masih bersikap sangat proteksional misalnya dengan pandangan yang anti-imigran dan mulai menunjukkan gejala-gejala anti-Cina. Demikian pula di dalam hal korporasi multinasional dari 500 perusahaan top dunia menurut majalah Fortune hanya 7% direkturnya diduduki oleh tenaga asing selebihnya tenaga-tenaga Amerika. Negara-negara berkembang hanyalah merupakan pasar dari produk-produk seperti Hermes, GM, Levi-Strauss, Coca-Cola, Pizza Hut. Demikian pula negara-negara yang sedang berkembang sebagai "the rich" terdapat geseran-geseran antara sesamanya. India dan Cina umpamanya bersaing di dalam ambisi militernya. Prof. Ghemawat melihat keuntungan globalisasi dewasa ini masih terbatas kepada kelompok yang beruang sedangkan mayoritas penduduk yang masih miskin belum memperoleh manfaat dari perubahan global tersebut. Oleh sebab itu sebaiknya prinsip persaingan bukan terutama diarahkan kepada persaingan dengan negara-negara maju tetapi kepada lingkungan sendiri, kepada saudara-saudara sendiri yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Inilah upaya untuk tetap mempertahankan identitas bangsa Indonesia, di dalam upayanya untuk

---

[11] **TIME,** June 27, 2011.

pertumbuhan ekonomi dan mengecapi keuntungan dari perubahan global. Persaingan dengan negara maju tidak merupakan keperluan esensial dari masih banyak saudara-saudara setanah air yang masih menderita atau dikesampingkan. Peranan pendidikan akan sangat besar di dalam mengubah kondisi tersebut hanya apabila manajemen pendidikan nasional didasarkan dan diarahkan kepada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

III. MANAJEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, OTONOMI DAERAH DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN GLOBAL

Otonomi daerah merupakan langkah positif di dalam pengelolaan pendidikan nasional menghadapi perubahan global. Tanggung jawab pemerintah di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berarti menyesuaikan pendidikan nasional dengan kebutuhan peserta didik di dalam lingkungan sosial ekonominya. Dengan demikian sistem pendidikan nasional tumbuh dari bawah dan bukan semata-mata untuk pencitraan pemerintah pusat. Upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan Millennium Development Goals yaitu tiap warganegara pada tahun 2016 telah memperoleh pendidikan dasar yang bermutu. Pendidikan dasar yang bermutu sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 ialah pendidikan yang menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas, cerdas di dalam arti sosial, ekonomi dan politik. Dalam bidang sosial manusia cerdas adalah manusia yang menghormati nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan puncak-puncak kehidupan kebudayaannya dapat disum-bangkan kepada budaya nasional yang merupakan dasar dari pendidikan nasional. Inilah dasar sebenarnya dari watak atau karakter bangsa Indonesia yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Manusia cerdas di dalam bidang ekonomi berarti bahwa manusia Indonesia itu dikembang-

kan potensinya dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya sehingga dengan demikian dia menjadi potensi untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dan derajat kemanusiaannya. Hal ini berarti kurikulum pendidikan dasar didasarkan kepada kebutuhan ekonomi dan potensi ekonomi dari setiap daerah. Manusia yang cerdas secara politik adalah manusia Indonesia yang dapat bertindak dan berbuat sebagai seorang yang demokratis sebagaimana yang telah lama dikenal di dalam kebudayaan Indonesia.

Local Wisdom Go Global[12]

Globalisasi telah merupakan gejala yang tidak terelakkan pada abad ke-21. Berbagai pendapat para pakar dan pengamat yang melihat dunia sebagai suatu kampung besar, ataupun menghilangnya batas-batas negara seperti pendapat Francis Fukuyama. Berbeda dengan pendapat-pendapat yang optimis mengenai globalisasi kita lihat apa yang diamati oleh Rana Foroohar mengenai globalisasi.[13]

> "As they see inequality rise within individual societies (even as the world's resources taken as a whole are being more equally shared), voters have become convinced that the benefits of globalization flow mainly to the rich down the street.
>
> And it's that local scene that matters. Our sense of our own reality is shaped in relation to our neighbors, not to the state of those far away ...."

Apa yang diamati oleh Rana Foroohar mengenai gejala-gejala yang ditimbulkan oleh globalisasi bukannya menunjukkan suatu sikap yang skeptis tetapi sikap yang hati-hati karena ke-

---

[12] Martha Tilaar, **Speech at the 7th World Islamic Economic Forum,** Astana, June 7, 2011.

[13] Rana Foroohar, "Why the World Isn't Getting Smaller," **TIME,** 27 June, 2011.

nyataannya globalisasi terarah kepada kelompok masyarakat yang kaya.

Bagaimanakah dengan keadaan di Indonesia? Kita lihat misalnya di kota-kota besar bermunculan mal-mal besar yang isinya dikuasai oleh produk-produk multinational corporation (MNC) yang bukan mustahil mematikan pasar-pasar tradisional, produk-produk lokal, kehidupan nelayan dan petani yang tetap miskin, apabila pemerintah tidak sungguh-sungguh mengarahkan perkembangan ekonomi untuk mengangkat derajat kaum miskin ini. Apakah Indonesia harus menerima keadaan demikian sebagai suatu nasib yang tidak terelakkan? World Economic Forum East Asia yang baru-baru ini dilaksanakan di Jakarta menunjukkan potensi Indonesia untuk investasi modal asing. Hal ini menunjukkan sebenarnya Indonesia menyimpan peluang-peluang besar bagi pasar dunia yang terbuka melihat kepada jumlah penduduknya nomor 4 di dunia. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pasar yang besar bagi penanaman modal asing. Peluang tersebut hendaknya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia oleh karena Indonesia dikaruniai kekayaan alam alam dan budayanya yang luar biasa. Di samping kekayaan alam yang tak terbatas, kekayaan budaya Indonesia masih banyak yang tersembunyi yang belum bermanfaat bagi rakyat banyak. Ambil saja contoh mengenai kekayaan laut Indonesia, hutan tropis yang terbesar sesudah Brazil, jamu-jamu serta obat tradisional yang tidak kalah dengan obat tradisional yang telah dikembangkan oleh Cina, potensi tumbuh-tumbuhan yang belum sepenuhnya dieksplorasi untuk sumber makanan dan obat-obatan, semuanya itu menanti tangan-tangan para pemikir dan pengembang bangsa Indonesia untuk dijadikan komoditi yang berharga untuk keperluan domestik mau-

pun untuk eksport. Banyak kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan ratusan suku bangsanya masih terkubur dalam lingkungan masyarakat lokal.

Apakah ada persamaan dan perbedaan antara Ayam Suharti dan Kentucky Fried Chicken (KFC)? Keduanya mempunyai persamaan lahir dari kearifan lokal. Ayam Suharti dilahirkan oleh keluarga dari Yogyakarta. KFC dari seorang Amerika penduduk di negara bagian Kentucky. Perbedaannya KFC didukung oleh kemajuan teknologi dan modal besar serta pola hidup global. KFC mempunyai franchise di seluruh dunia. Ayam Suharti mulai dikenal di seluruh Indonesia dan di Singapura. Bukan tidak mungkin Ayam Suharti akan tersebar pula di seluruh dunia. Demikianlah banyak kearifan lokal yang dapat dikembangkan untuk perdagangan global yang perlu ditunjang oleh penelitian dan pengembangan serta teknologi canggih sehingga dapat bersaing dengan produk-produk lainnya di dunia. Upaya ini hanya dapat terjadi apabila ditopang oleh masyarakat itu sendiri dan pemerintahnya.

Dari manakah kearifan lokal (local wisdom) dapat ditumbuhkan dan dikembangkan? Pertama-tama tentunya para generasi muda melalui pendidikan sejak dini mengenal akan kearifannya yang hidup di dalam masyarakatnya sendiri. Kearifan lokal biasanya ditunjang oleh alam sekitar yang memberikan peluang lahirnya kearifan lokal tersebut. Disinilah letaknya penyusunan KTSP yang harus digali dan dikembangkan dari lingkungan primer. Selanjutnya di dalam lingkungan pendidikan yang lebih lanjut kecintaan terhadap local wisdom, produk lokal, disertai dengan pengua-saan keterampilan serta penerapan teknologi canggih akan menempatkan kreasi dari kearifan lokal memasuki pasar dunia. Pada gilirannya pendidikan tinggi diarahkan kepada kemampuan-kemampuan

yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan serta pengetahuan mengenai peluang-peluang terbuka di pasar global. Inilah pendidikan yang berwajah world class.

Manajemen Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi

Setelah kita lihat pentingnya pendidikan di dalam perubahan global yang serba cepat serta menimbang pula perubahan global yang meminta refleksi terhadap identitas diri seperti yang dikemukakan oleh Rana Foroohar, tentunya meminta manajemen pendidikan nasional yang sesuai. Tentunya kita tidak perlu jatuh di dalam pemikiran binner seperti mempertentangkan antara kebudayaan Barat dan kebudayaan Timur. (Oksidentalisme dan orientalisme), tetapi kita menghadapi perubahan global dengan sikap yang positif yaitu dengan berdiri dengan kedua kaki kita di Pertiwi Indonesia dengan segala potensinya. Manajemen pendidikan pada dasarnya meliputi berbagai usaha dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional seperti yang telah dirumuskan di dalam UUD 1945 ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dalam arti cerdas akal, cerdas dalam kehidupan sosial dan cerdas di dalam kehidupan ekonomi. Proses untuk mencapai tujuan tersebut didasarkan kepada nilai-nilai bersama yang telah disepakati yaitu nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai pertemuan antara kebijakan publik (public policy) dan kebijakan pendidikan (educational policy). Kedua kebijakan tersebut lahir dan mengalir dari filsafat moral yang sama yaitu filsafat moral Pancasila.[14]

---

[14] H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho, **Kebijakan Pendidikan** (2008).

Pendidikan Dasar

Kurikulum pendidikan dasar (SD, SMP) yang disebut KTSP disusun di daerah (kabupaten/kota) dengan koordinasi Dinas Pendidikan Propinsi. MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) disesuaikan menjadi MBM (Manajemen Berdasarkan Masyarakat). MBS suatu konsep yang baik yang telah dilahirkan di negara-negara maju. Pengalaman masyarakat Indonesia dengan pendidikan pesantren menunjukkan bahwa pendidikan dasar sebaiknya merupakan milik masyarakat setempat. Oleh sebab itu manajemen pendidikannya bukan semata-mata berdasarkan kepada kepentingan sekolah an sich tetapi kepada kepentingan masyarakat setempat.

Pusat pelatihan dan sertifikasi guru (PLSG) dihidupkan kembali di tingkat propinsi dibantu oleh universitas daerah setempat. Dengan pendaerahan pusat pelatihan serta sertifikasi bukan hanya memberikan efisiensi program tersebut tetapi juga lebih mendekatkan kepada lapangan. Para pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru yang berpengalaman dapat memberikan sumbangan bagi pendekatan profesionalisme guru di daerah.

Melihat kepada potensi guru di dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bhinneka (multikultural) sebaiknya tenaga pendidik dikelola oleh pemerintah pusat. Dengan kebijakan itu antara lain dapat dihindarkan pengangkatan Kepala Dinas, Pengawas, Kepala Sekolah berdasarkan pertimbangan politik serta memungkinkan mobilisasi tenaga pendidik ke seluruh tanah air di dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang multikultural.

Pendidikan Menengah

Manajemen pendidikan menengah telah mulai diarahkan secara intensif kepada pengembangan sumber daya manusia yang terampil di dalam pembangunan daerah. Pengembangan koridor-koridor baru di dalam pembangunan meminta tenaga-tenaga menengah yang cukup banyak yang dapat di-*supply* pertama-tama oleh sekolah menengah kejuruan di daerah perkembangan tersebut. Bagi sekolah menengah umum yang menyiapkan para siswanya untuk memasuki universitas kerjasama dengan universitas daerah merupakan suatu keharusan. Pusat pelatihan dan pengembangan guru sekolah menengah di tingkat propinsi merupakan kerjasama tripartit antara universitas di daerah, perusahaan-perusahaan/KADIN di daerah dan masyarakat, sekolah menengah kejuruan disesuai dengan kebutuhan tenaga-tenaga menengah di daerah.

Manajemen Pendidikan Tinggi

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan tinggi mempunyai otonomi di dalam manajemennya. Kecenderungan dewasa ini pendidikan tinggi berlomba-lomba untuk menjadi atau mempunyai predikat "world class university." Pengertian world class university ini mengandung konotasi seperti yang telah dijelaskan di depan ialah persaingan dengan universitas-universitas dunia yang telah maju. Tentunya manajemen macam ini sangat keliru oleh sebab salah satu misi dari perguruan tinggi ialah penelitian dan pengembangan. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia dan kebudayaan tidak kekurangan bidang-bidang yang perlu digarap. Bahkan dengan kekayaannya itu universitas di Indonesia dapat menjadi lahan penelitian dan pengembangan bagi para

mahasiswa dari seluruh dunia. Selain daripada itu dengan mengarahkan penelitian dan pengembangan universitas kepada potensi dan kekayaan alam dan budaya Indonesia maka universitas di Indonesia akan memenuhi salah satu misi pengabdian kepada masyarakat yang luar biasa luasnya. Peningkatan kemampuan R & D yang terpusat kepada kekayaan alam dan budaya Indonesia serta peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia akan menjadikan universitas di Indonesia benar-benar menjadi world class.

Pengalaman penulis dalam mengikuti World Islamic Economic Forum di Kazakhstan baru-baru ini melihat bagaimana Kazakhstan sebagai salah negara Islam besar di dunia mengembangkan universitasnya. Dalam jangka waktu 20 tahun kemerdekaannya mereka mulai mengembangkan 20 PTN dan 30 PTS-nya dengan mengkaryakan sekitar 350 gurubesar dari negara-negara maju untuk mengembangkan kemampuan R & D di universitasnya. Dengan demikian diharapkan kekayaan negara tersebut akan diteliti dan dikembangkan oleh para ahli keluaran universitasnya sendiri. [15]

Kesimpulan dan Saran

Beberapa kesimpulan penting yang dapat ditarik dari tulisan ini sebagai berikut :

1. Manajemen sistem pendidikan nasional dewasa ini menunjukkan gejala mengikuti paham neoliberal yang jelas bertentangan dengan UUD 1945.
2. Manajemen sistem pendidikan nasional membuka diri atas perubahan-perubahan global namun tetap berpijak pada kepen-

[15] **THE ASTANA TIMES,** Thursday, 2 June 2011.

tingan rakyat yaitu pertama-tama meningkatkan taraf hidup rakyat dan mencerdaskan kehidupannya.

3. Sistem pendidikan nasional diarahkan kepada penggalian, pemanfaatan, dan peningkatan kearifan lokal (local wisdom) yang pertama-tama dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan kemampuan tersebut memperkuat terbinanya watak (karakter) bangsa Indonesia yang mempunyai identitas sebagai bangsa dan sekaligus dapat menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi kemanusiaan. Inilah upaya yang disebut membawa pendidikan Indonesia pada taraf world class education.

Beberapa Saran

1. Pendidikan nasional yang dapat mengembangkan watak (karakter) bangsa Indonesia adalah pendidikan nasional yang berdiri dan berkembang di atas bumi Indonesia untuk pertama-tama kepentingan bangsa Indonesia dan dengan demikian memberikan sumbangan bagi pendidikan di dunia.
2. Manajemen pendidikan nasional Indonesia diarahkan dari MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) kepada Manajemen Berbasis Masyarakat (MBM). Dalam kaitan ini perlu digalakkan dan diefektifkan lembaga-lembaga Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, di tingkat daerah dan di tingkat nasional.
3. Manajemen pendidikan nasional bersumber dari kebijakan pendidikan nasional yang bersamaan sumbernya dengan kebijakan publik (public policy) yaitu falsafah moral Pancasila.

Referensi

Apple, Michael W. (editor). 2010. **Global Crises, Social Justice, and Education.** Routledge, New York.

Apple, Michael W., Jane Kenway & Michael Singh (editors). 2007. **Globalizing Education. Policies, Pedagogies & Politics.** Peter Lang, New York.

Friedman, Thomas L. 2008. **Hot, Flat, and Crowded. Why the World Needs a Green Revolution – and How We Can Renew Our Global Future.** Pinguin Books, London.

Gramsci, Antonio. 2001. **Catatan-catatan Politik** (terjemahan). Pustaka Promothea, Surabaya.

Gramsci, Antonio. 1991. **Selected from Cultural Writings.** Harvard University Press, Cambridge, MA.

Held, David & Anthony McGrew. 2003. **Globalization/Anti-globalization.** Malden, Massachusetts.

KOMPAS, 27 Mei 2011. "Asing Terus Incar Lahan Sawit."

KOMPAS, 26 Mei 2011. "Kuat, Penetrasi Asing di Kerajinan."

KOMPAS, 25 Mei 2011. "Hulu-Hilir Pangan oleh Asing."

KOMPAS, 24 Mei 2011. "Investor Asing juga Menguasai Pariwisata."

Manurung, Butet. 2008. **Sakola Rimba.** Pengalaman Belajar Bersama Orang Rimba, INSIST, Yogyakarta.

Marina Parkhomenko, "Minister Says Educational Change Creating Brighter Future." **THE ASTANA TIMES,** Thursday, 2 June, 2011.

MEDIA INDONESIA, 26 Mei 2011. "Persatuan Para Pemimpin Bangsa dalam Semangat Pancasila."

Popkewitz, Thomas & Fasal Rizvi (editors). 2009. **Globalization and the Study of Education.** The 108th Yearbook of the National Study of Education. Volume II. Wiley-Malden, Massachusetts.

Raley, Yvonne & Gerhard Preyer (ed.). 2010. **Philosophy of Education in the Era of Globalization.** Routledge, New York.

Rana Foroohar, "Why the World Isn't Getting Smaller." Politics is Local. So is economics. They may become more so as the world get richer." **TIME,** June 27, 2011.

Ritzer, George. 2006 (terjemahan). **The Globalization of Nothing.** Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Sri-Edi Swasono, "Pancasila dan Nasionalisme Kampus," **KOMPAS,** Jumat, 3 Juni 2011.

Tilaar, H.A.R. 2009. **Kekuasaan dan Pendidikan. Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan** (cetakan II). Rineka Cipta,Jakarta.

Tilaar, H.A.R. & Riant Nugroho. 2008. **Kebijakan Pendidikan. Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pen-didikan sebagai Kebijakan Publik.** Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Tilaar, H.A.R. 2008. "Manajemen Pendidikan Nasional yang Dijiwai UUD 1945." Makalah disampaikan dalam **KONASPI VI** di Denpasar, 18 Nopember 2008.

Tilaar, H.A.R. 2007. **Mengindonesia. Etnisitas dan Identitas Bangsa Indone-sia. Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan.** Rineka Cipta, Jakarta.

UUD 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Media Pressindo, Yog-yakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025. FOKUSMEDIA, Bandung.

Undang-Undang Otonomi Daerah (terbaru), 2006, Pustaka Pergaulan Jakarta (UU No. 32, 2004, UU No. 33, 2004, UU No. 8, 2005).

Yudi Latif, "Menghidupkan Pancasila," **GATRA**, No. 30 Tahun XVII, 8 Juni 2001.

Buku-Buku Karya Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed

1) **Pendidikan dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI**, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
2) **Manajemen Pendidikan Nasional. *Kajian Pendidikan Masa Depan,*** *Rosdakarya 1992*
3) **Analisis Kebijakan Pendidikan** (karya bersama Dr. Ace Suryadi), Rosdakarya, 1993
4) **Lima Puluh Tahun Pendidikan Nasional: 1945–1995. *Suatu Analisis Kebijakan,*** Gramedia, Jakarta, 1995
5) **Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi: Visi, Misi, dan Program Aksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020,** Gramedia, Jakarta, 1997, 2001.
6) **Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional,** INDONESIATERA, Mage-lang, 1998, 2001.
7) **Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia,** Rosdakarya, 1999.
8) **Paradigma Baru Pendidikan Nasional,** Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
9) **Membenahi Pendidikan Nasional,** Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
10) **Perubahan Sosial dan Pendidikan. *Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesi,*** Gramedia, Jakarta, 2002.
11) **Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru,** Festschrift 70 Tahun, Grasindo, Jakarta, 2002.
12) **Kekuasaan dan Pendidikan. *Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural,*** IN-DONESIATERA, Magelang, 2003.
13) **Multikulturalisme. *Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional,*** Grasindo, Jakarta, 2004.
14) **Manifesto Pendidikan Nasional. *Tinjauan dari Perspektif Posmodernisme dan Studi Kultural,*** Penerbit Buku KOMPAS, Jakarta, 2005.
15) **Standarisasi Pendidikan Nasional,** Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
16) **Mengindonesia. Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia ,** Rineka Cipta, Ja-karta, 2007.
17) ***Menggugat Manajemen Pendidikan Nasional,*** Lembaga Manajemen Universitas Negeri Jakarta, 2008
18) **Kebijakan Pendidikan** (Karya bersama Dr. Riant Nugroho), Pustaka Pelajar, Yogya-karta, 2008.
19) **Kekuasaan dan Pendidikan. Pendidikan dalam Arus Pergulatan Kekua-saan** (Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2009).
20) **Pendidikan Tinggi di Indonesia 2010. Menuju World Class University?** Jurnal DINAMIKA MASYARAKAT, Juni 2009.
21) **Pedagogik Kritis: Perkembangan, Substansi, dan Perkembangannya di Indonesia,** Rineka Cipta, Jakarta, 2010.